



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 02 Januari 2017

Halaman: 21

PKL Nakal Malioboro Belum Ditindak

● YULIANINGSIH

Saat ini, kawasan Malioboro sedang dalam proses penataan.

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, DIY, belum melakukan tindakan tegas terhadap para pedagang kaki lima (PKL) dan tukang parkir nakal di kawasan Malioboro selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2017. Sebelumnya, Dintib sudah menerima banyak aduan terkait PKL dan tukang parkir nakal tersebut.

Menurut Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, kawasan Malioboro masih dalam proses penataan. Karenanya, kata dia, semua elemen di kawasan ini masih berbenah. "Ini proses penataan. Kita tetap mendorong UPT Malioboro dan komunitas PKL untuk berbenah diri menyamping dengan penataan fisik yang dilakukan," ujarnya, Ahad (1/1).

Ia menjelaskan, Kota Yogyakarta memiliki Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL yang bisa menjadi dasar hukum penanganan PKL. Hal itu juga menjadi pencermatan Pemda DIY saat ini dalam menangani PKL Malioboro. Namun, ia menegaskan lagi, kawasan Malioboro sedang dalam penataan.

Dengan demikian, papar dia, yang diperlukan bukan perda penertiban, tapi penataan. Ia menilai hal itu juga berkaitan dengan kesadaran pelaku ekonomi dan pengguna fasilitas umum di Malioboro.

"Tidak bisa itu semata-mata dibebankan kepada aparat. Aparat UPT berapa, Dintib berapa? Masak aparat harus 'men-teleng' tiap hari. Saya mengajak masyarakat untuk menyadarkan diri masing-masing," katanya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk saling mengawasi terhadap kebersihan dan ketertiban di Malioboro. Pemerintah daerah, lanjut dia, sudah menyediakan tempat sampah, sehingga masyarakat diminta tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi di taman yang kini telah dibangun.

Dipaparkan, terkait kebersihan, pemerintah daerah juga telah memiliki aturan Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Bagi pelanggaran perda seperti membuang sampah sembarangan dapat dikenai denda maksimal Rp 20 juta dan kurungan maksimal tiga bulan. Namun, menurutnya, sanksi denda

dan kurungan bukan solusi jika tidak ada kesadaran masyarakat.

"Sebenarnya bukan denda dan kurungannya. Tapi bagaimana masyarakat menghargai apa yang sudah dibangun pemerintah, untuk kepentingan dan manfaat masyarakat sendiri," ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, Syarif Teguh Prabowo, mengatakan pihaknya akan melakukan eksekusi Jogoboro untuk gugus infrastruktur taman dan kebersihan Malioboro. Ia menegaskan bagi PKL yang tidak kooperatif dengan peraturan dan tidak peduli kebersihan, maka izin berjualan akan dicabut.

Upaya persuasif mengingatkan selama ini telah dilakukan. "Jogoboro gugus infrastruktur taman dan kebersihan 'sweeping' 24 jam seperti taman rusak, lampu mati, jalur difabel lepas, sampah, limbah penuh, got kotor, dan lainnya," kata dia.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, mengaku di internal komisi sudah ada pembicaraan untuk mengundang pihak terkait untuk evaluasi pelaksanaan pariwisata di Yogyakarta pada 2016. Terutama pada akhir tahun ini yang banyak menjadi sorotan.

"Kami juga mengikuti di media sosial yang ramai membicarakan pariwisata Yogyakarta, untuk itu kami akan minta penjelasan eksekutif," ujarnya.

Menurut dia, sebagai salah satu ungulan Kota Yogyakarta, masih banyak pelaku pariwisata yang belum menunjukkan perilaku sadar wisata. Seperti dengan menaikkan tarif parkir, kuliner, serta jasa hingga berlipat-lipat. "Sebenarnya selalu terjadi saat liburan, masalahnya kok seperti tidak ada antisipasi dan selalu berulang," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memersilakan masyarakat untuk mengkritisi upaya pembenahan dan revitalisasi kawasan Malioboro. "Meskipun tahap pertama revitalisasi Malioboro selesai, masyarakat Yogyakarta, pendatang/wisatawan yang punya kesempatan menikmati Malioboro, kami mohon untuk bisa mengkritisi, atau punya saran perbaikan silahkan disampaikan untuk kepentingan bersama," kata Sultan.

Menurut gubernur, saat ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. "Jangan sampai setelah semuanya sudah jadi baru punya komentar. Nah ini yang repot. Dari awal kalau melihat sesuatu yang tidak pas ya dari awal juga mengkritisi, sehingga hasilnya baik, yang mengerjakan puas, dan masyarakat mendapatkan sesuatu yang aman dan nyaman," jelasnya.

■ neni ridarini ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. UPT. Malioboro	☐ Negatif	☐ Amat Seges
2. Din. Ketertiban	☐ Positif	☐ Segera
3.	☒ Netral	☒ Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005